

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

###### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang wilayahnya berada di kawasan barat bagian tengah, secara geografis terletak pada koordinat  $111^{\circ} 5'$  sampai  $111^{\circ} 13'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 20'$  sampai  $7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $1.224,33 \text{ km}^2$  (122.433,1 ha). Secara administratif wilayah Kabupaten Nganjuk disebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan dengan wilayah Kabupaten Kediri dan Trenggalek, sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Jombang dan Kediri, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan dan 284 desa dan kelurahan. Dari luas wilayah administratif tersebut secara umum untuk pola penggunaan tanahnya yang dapat diusahakan guna pengembangan budidaya pertanian seluas kurang lebih 42.986,40 ha (35,11%) dan kehutanan seluas 47.007,00 ha (38,39%), sedangkan sisanya merupakan lahan kering seluas 32.439,7 ha (26,50%) termasuk di dalamnya yang dipergunakan bagi permukiman seluas kurang lebih 14.739,10 ha. Dengan demikian maka wilayah administratif Kabupaten Nganjuk merupakan suatu wilayah yang cukup potensial sebagai daerah pengembangan sektor pertanian dan industri kehutanan; karena dari luas

wilayah yang diusahakan untuk areal pertanian pada umumnya sudah didukung sistem jaringan irigasi yang baik, yaitu areal berpengairan teknis seluas 34.239,70 ha, non teknis seluas 4.681,10 ha, serta pasang surut/folder/rembesan dan tadah hujan seluas 4.065,60 Ha. Adapun data pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 3 Luas Wilayah Kecamatan menurut Jenis Tanah berdasarkan Podes Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jenis Tanah			Jumlah (Ha)
		Sawah (Ha)	Kering (Ha)	Hutan (Ha)	
1.	Sawahan	1.117,0	2.554,9	7.916,7	11.588,6
2.	Ngetos	1.586,0	1.882,8	2.612,4	6.021,2
3.	Berbek	2.005,9	1.173,6	1.650,2	4.830,0
4.	Loceret	2.766,5	1.968,9	2.134,1	6.869,2
5.	Pace	2.794,7	1.884,4	166,6	4.845,7
6.	Tanjunganom	4.028,8	3.055,4	0	7.084,2
7.	Prambon	2.442,2	1.673,6	0	4.115,8
8.	Ngronggot	1.979,2	3.319,3	0	5.298,5
9.	Kertosono	1.194,6	1.072,9	0	2.267,5
10.	Patianrowo	1.929,5	1.629,8	0	3.559,3
11.	Baron	2.115,3	1.564,9	0	3.680,2
12.	Gondang	3.544,4	2.176,2	3.873,7	9.594,3
13.	Sukomoro	2.742,1	796,7	0	3.538,8
14.	Nganjuk	1.194,4	1.064,2	0	2.258,6
15.	Bagor	2.355,4	1.155,6	1.604,3	5.115,3
16.	Wilangan	1.132,5	598,5	3.332,9	5.063,9
17.	Rejoso	4.310,6	1.489,2	9.366,5	15.166,3
18.	Ngluyu	1.036,5	929,1	6.649,3	8.614,9
19.	Lengkong	1.604,8	1.156,2	5.956,3	8.717,3
20.	Jatikalen	1.106,0	1.353,5	1.744,0	4.203,5
	Jumlah	42.986,4	32.439,7	47.007,0	122.433,1

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011)

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai 95 meter di atas permukaan laut (dpl), dan terdapat 4 (empat) wilayah kecamatan yang berada pada daerah dataran tinggi sepanjang lereng pegunungan wilis dengan ketinggian 150 sampai 750 meter di atas permukaan laut (dpl). Dari 4 (empat) wilayah kecamatan tersebut, wilayah Kecamatan Sawahan merupakan wilayah yang terletak di dataran tinggi khususnya Desa Ngliman Kecamatan Sawahan. Wilayah Kabupaten Nganjuk secara geologi memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, antara lain tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan hutan jati. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ditunjang dengan ketersediaan air dari Kali Widas yang mengalir sepanjang 91 km dan mengairi wilayah Kabupaten Nganjuk seluas 430,150 km<sup>2</sup>.

#### **b. Pemerintahan Kabupaten Nganjuk**

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah / wilayah atau negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Nganjuk mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Jawa Timur. Unit pemerintahan di bawah Pemerintah Kabupaten secara langsung adalah Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa dan sebagian kelurahan, dari masing-masing desa/kelurahan tersebut terbagi atas dusun/dukuh, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 122433,1 ha dibagi habis menjadi 20 (dua puluh) wilayah Kecamatan dan 284

(dua ratus delapan puluh empat) desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Rejoso dengan 24 desa, dan Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Ngluyu yaitu dengan jumlah desa masing-masing 6 (enam) desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Banyaknya Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kepala Desa	Carik	PTL
1.	Sawah	9	9	8	98
2.	Ngetos	9	8	9	82
3.	Berbek	19	19	18	138
4.	Loceret	22	22	19	169
5.	Pace	18	18	18	167
6.	Tanjunganom	14	14	11	172
7.	Prambon	14	13	13	150
8.	Ngronggot	13	13	12	148
9.	Kertosono	13	11	10	95
10.	Patianrowo	11	11	9	98
11.	Baron	11	17	9	124
12.	Gondang	17	10	12	152
13.	Sukomoro	10	10	10	96
14.	Nganjuk	2	2	2	17
15.	Bagor	19	19	15	146
16.	Wilangan	6	6	5	59
17.	Rejoso	24	23	19	206
18.	Ngluyu	6	6	5	49
19.	Lengkong	16	16	13	112
20.	Jatikalen	11	11	9	85
	Jumlah	264	261	226	2363

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011)



Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Nganjuk

**c. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Nganjuk**

Salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai potensi pendukung pembangunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 1,017,030 jiwa, dengan perincian sebesar 505,687 jiwa penduduk laki-laki dan sebesar 511,343 jiwa penduduk perempuan, meningkat 1.44 persen dibanding tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 5 yang dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5 Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sawahan	17.916	18.099	36.015
2.	Ngetos	17.046	17.066	34.112
3.	Berbek	26.973	26.759	53.732
4.	Loceret	34.251	34.658	68.909
5.	Pace	29.268	29.715	58.983
6.	Tanjunganom	53.802	54.829	108.631
7.	Prambon	34.125	34.399	68.524
8.	Ngronggot	37.780	37.304	75.084
9.	Kertosono	25.881	26.524	52.405
10.	Patianrowo	20.464	20.426	40.890
11.	Baron	24.073	23.996	48.069
12.	Gondang	25.034	24.993	50.027
13.	Sukomoro	20.850	20.716	41.566
14.	Nganjuk	32.153	33.764	65.917
15.	Bagor	28.008	28.745	56.753
16.	Wilangan	13.326	13.584	26.910
17.	Rejoso	32.779	33.388	66.167
18.	Ngluyu	6.765	6.923	13.688
19.	Lengkong	15.535	15.677	31.212
20.	Jatikalen	9.658	9.778	19.436
Jumlah/Total		505.687	511.343	1.017.030

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011)

Lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus dari 1.002.560 jiwa pada tahun 2009 menjadi 1.017.030 pada tahun 2010, yang berarti pertumbuhan rata-rata per tahun hasil registrasi penduduk tahunan dan sensus penduduk sebesar 1,44 persen. Dapat terlihat pada tabel 5 diatas dari hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase penduduk terbesar ada di Kecamatan Tanjunganom 10,68 persen (108,631 jiwa) yang hanya menempati 5,79 persen wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari 20 Kecamatan yang ada ternyata Kecamatan Ngluyu memiliki penduduk paling sedikit yaitu 1,35 persen (13,688 jiwa) meskipun luas wilayahnya lebih besar (7,04 persen).

Mengingat perkembangan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Nganjuk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sejumlah 819 jiwa/Km<sup>2</sup> pada akhir 2009 menjadi sejumlah 831 jiwa/Km<sup>2</sup> pada akhir tahun 2010. Kepadatan penduduk di kecamatan memiliki keragaman yang tinggi, dengan variasi kepadatan antar kecamatan berkisar antara 159 jiwa sampai 2,918 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari tabel 6 yang tertera di bawah ini dapat dilihat bahwa Kecamatan yang padat adalah Kecamatan Nganjuk 2,918 jiwa/Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kertosono 2,311 jiwa/Km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Ngluyu 159 jiwa/Km<sup>2</sup>. Di bawah ini akan dijelaskan tentang kepadatan penduduk menurut Kecamatan serta perkembangan penduduk per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 6 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan	Persentase (%)	
					Penduduk	Luas
1.	Sawahan	36.015	115.886	311	3,54	9,47
2.	Ngetos	34.112	60.212	567	3,35	4,92
3.	Berbek	53.732	48.3	1.112	5,28	3,95
4.	Loceret	68.909	68.692	1.003	6,78	5,61
5.	Pace	58.983	48.457	1.217	5,80	3,96
6.	Tanjunganom	108.631	70.842	1.533	10,68	5,79
7.	Prambon	68.524	41.158	1.665	6,74	3,36
8.	Ngronggot	75.084	52.985	1.417	7,38	4,33
9.	Kertosono	52.405	22.675	2.311	5,15	1,85
10.	Patianrowo	40.890	35.593	1.149	4,02	2,91
11.	Baron	48.069	36.802	1.306	4,73	3,01
12.	Gondang	50.027	95.943	521	4,92	7,84
13.	Sukomoro	41.566	35.388	1.175	4,09	2,89
14.	Nganjuk	65.917	22.586	2.918	6,48	1,84
15.	Bagor	56.753	51.153	1.109	5,58	4,18
16.	Wilangan	26.910	50.639	531	2,65	4,14
17.	Rejoso	66.167	151.663	436	6,51	12,39
18.	Ngluyu	13.688	86.149	159	1,35	7,04
19.	Lengkong	31.212	87.173	358	3,07	7,12
20.	Jatikalen	19.436	42.035	462	1,91	3,43
Jumlah/Total		1.017.030	1.224,33		100,00	100,00

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011)

Tabel 7 Perkembangan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010

No	Kecamatan	Penduduk 2009	Penduduk 2010	Pertambahan	Persentase (%)
1.	Sawahan	36.023	36.015	-8	-0.02
2.	Ngetos	34.127	34.112	-15	-0.04
3.	Berbek	51.048	53.732	2.684	5.26
4.	Loceret	66.433	68.909	2.476	3.73
5.	Pace	59.892	58.983	-909	-1.52
6.	Tanjunganom	105.545	108.631	3.086	2.92
7.	Prambon	64.496	68.524	4.028	6.25
8.	Ngronggot	68.962	75.084	6.122	8.88
9.	Kertosono	56.260	52.405	-3855	-6.85
10.	Patianrowo	41.120	40.890	-230	-0.56
11.	Baron	50.995	48.069	-2.926	-5.74
12.	Gondang	51.962	50.027	-1.935	-3.72
13.	Sukomoro	40.239	41.566	1.327	3.30
14.	Nganjuk	62.605	65.917	3.312	5.29
15.	Bagor	53.551	56.753	3.202	5.98
16.	Wilangan	29.476	26.910	-2.566	-8.71
17.	Rejoso	65.749	66.167	418	0.64
18.	Ngluyu	13.540	13.688	148	1.09
19.	Lengkong	31.799	31.212	-587	-1.85
20.	Jatikalen	18.708	19.436	728	3.89
Jumlah 2009-2010		1.002.560	1.017.030	14.470	1.44

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011)

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Sukomoro

### a. Kondisi Geografis

Kecamatan Sukomoro mempunyai luas wilayah 25,38 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah disebelah utara adalah Kecamatan Gondang, sebelah timur Kecamatan Tanjunganom, Sebelah selatan Kecamatan Loceret, sebelah Barat Kecamatan Nganjuk. Dilihat dari kondisi topografinya wilayah Kecamatan Sukomoro berada pada ketinggian rata-rata 54 M di atas permukaan air laut (dpal), dengan luas lahan seluas 3.186,31 Ha, dan dikelompokkan dalam dua fungsi lahan yaitu lahan sawah seluas 2.646,30 Ha dan lahan kering (darat) seluas 540,01 Ha. Wilayah kecamatan Sukomoro termasuk iklim basah dengan tingkat curah hujan selama 1



tahun terakhir rata-rata sebesar 1.205 mm dan hari hujan rata-rata sebanyak 53 hari. Adapun data luas lahan sawah dan lahan kering (darat) sebagai berikut:

Tabel 8 Luas Sawah dan Lahan Kering Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Sumengko	383,74	90,46	474,20
2.	Kapas	294,74	34,09	328,83
3.	Blitaran	111,56	19,90	131,46
4.	Kedungsoko	185,90	52,60	238,50
5.	Nglundo	197	29,60	226,60
6.	Bungur	216	34,50	250,50
7.	Sukomoro	130	31,41	161,41
8.	Pehserut	160,53	31,06	191,59
9.	Ngrami	290	50,31	340,31
10.	Bagor Wetan	303	50,05	353,05
11.	Putren	290	81,17	371,17
12.	Ngrengket	83,83	34,86	118,69
Jumlah		2.646,30	540,01	3.186,31

Sumber : Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

#### b. Pemerintahan Kecamatan Sukomoro

Kecamatan Sukomoro secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 2 (dua) kelurahan yang termasuk klasifikasi swasembada. Nama-nama desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Sukomoro dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 9 Nama Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukomoro

No	Nama Desa/Kelurahan
1.	Desa Sumengko
2.	Kelurahan Kapas
3.	Desa Blitaran
4.	Desa Kedungsoko
5.	Desa Nglundo
6.	Desa Bungur
7.	Kelurahan Sukomoro
8.	Desa Pehserut
9.	Desa Ngrami
10.	Desa Bagorwetan
11.	Desa Putren
12.	Desa Ngrengket

Sumber : BPS (Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2011

Jumlah aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukomoro sampai dengan tahun 2011 adalah 131 orang yang terdiri atas Kepala Desa 10 orang, Kepala Kelurahan 2 orang, Sekretaris Desa 10 orang, Sekretaris Kelurahan 2 orang, Perangkat Desa 95 orang dan Perangkat Kelurahan 12 orang. Rincian jumlah aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukomoro sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Kepala Desa/ Kelurahan	Sekretaris Desa	Perangkat Desa/Kelurahan
1.	Sumengko	1	1	13
2.	Kapas	1	1	7
3.	Blitaran	1	1	8
4.	Kedungsoko	1	1	8
5.	Nglundo	1	1	10
6.	Bungur	1	1	8
7.	Sukomoro	1	1	5
8.	Pehserut	1	1	8
9.	Ngrami	1	1	10
10.	Bagorwetan	1	1	11
11.	Putren	1	1	11
12.	Ngrengket	1	1	8
	Jumlah	12	12	107

Sumber : Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

Pemerintah Kecamatan Sukomoro memiliki kekayaan atau aset berupa tanah kas desa yang luasnya mencapai 433,345 Ha, terdiri atas tanah eks bengkok seluas 384,635 Ha selain eks bengkok 48,66 Ha; selain tanah kas desa untuk aset atau kekayaan Pemerintah Kecamatan Sukomoro berupa lapangan sebanyak 10 buah. Selain tanah kas desa dan lapangan tersebut, kekayaannya berupa jalan desa, jalan kabupaten dan jalan nasional sepanjang 114 km. Data kekayaan Pemerintah Kecamatan Sukomoro dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11 Kekayaan Desa Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/ Kelurahan	Bengkok/ Eks Bengkok (Ha)	Titisoro	Lapangan	Jalan (km)	Lain-lain (pasar Desa)
1.	Sumengko	51,375	4,500	1	18	-
2.	Kapas	35,340	0,290	1	8	-
3.	Blitaran	20,800	2,000	1	6	-
4.	Kedungsoko	23,500	2,500	-	8	-
5.	Nglundo	28,810	2,800	1	9	-
6.	Bungur	32,120	1,000	1	13	-
7.	Sukomoro	18,500	3,500	1	8	-
8.	Pehserut	24,000	7,000	1	12	-
9.	Ngrami	34,025	1,600	1	7	-
10.	Bagorwetan	42,090	4,800	1	6	-
11.	Putren	37,125	15,170	1	12	-
12.	Ngrenget	27,000	3,500	-	7	-
	Jumlah	384,685	48,660	10	114	-

Sumber : Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

### c. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kecamatan Sukomoro

Penduduk di Kecamatan Sukomoro pada tahun 2011 berjumlah 42.250 jiwa dengan jumlah rumah tangga 14.525 dengan anggota keluarga rata-rata 3-4 jiwa. Dibandingkan luas wilayahnya kepadatan penduduk Kecamatan Sukomoro telah mencapai 2.794,88 jiwa/km<sup>2</sup> dengan keadaan jumlah penduduk tidak terlepas dari pengaruh fertilitas, mortalitas dan migrasi penduduk (pindah, datang). Migrasi penduduk yang meliputi penduduk datang sejumlah 173 jiwa dan penduduk keluar dari Kecamatan Sukomoro mencapai 100 jiwa. Di bawah ini akan dijelaskan tentang jumlah kepadatan penduduk serta jumlah penduduk miskin di wilayah Kecamatan Sukomoro sebagai berikut:

Tabel 12 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )
1.	Sumengko	513,01	6.208	1.228
2.	Kapas	369,16	5.383	1.456
3.	Blitaran	151,76	2.176	1.429
4.	Kedungsoko	286,00	1.881	659
5.	Nglundo	246,18	2.358	952
6.	Bungur	274,15	3.312	1.024
7.	Sukomoro	188,10	3.322	1.768
8.	Pehserut	213,54	2.983	1.386
9.	Ngrami	373,39	4.018	1.072
10.	Bagor Wetan	380,14	3.215	844
11.	Putren	409,18	5.157	1.258
12.	Ngrengket	134,18	2.340	1.730
Jumlah		3.538,79	42.353	14.806

Sumber : Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

Tabel 13 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin di Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Sumengko	6208	1.674	626	1092
2.	Kapas	5383	1.213	280	1507
3.	Blitaran	2176	561	301	872
4.	Kedungsoko	1881	512	252	803
5.	Nglundo	2358	598	276	622
6.	Bungur	3312	874	389	1220
7.	Sukomoro	3322	769	187	926
8.	Pehserut	2983	794	298	184
9.	Ngrami	4018	1.019	622	1466
10.	Bagor Wetan	3215	943	562	1436
11.	Putren	5157	1.232	610	1570
12.	Ngrengket	2340	572	214	524
Jumlah		42.353	4.817	10.761	12.222

Sumber: Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

Komposisi jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sukomoro menurut golongan umur dewasa dan anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 21.137 jiwa dan perempuan 21.121 jiwa, untuk golongan umur dewasa dengan jumlah penduduk laki-laki 13.311 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 27.253 jiwa, sedangkan jumlah penduduk golongan anak-anak untuk laki-laki sejumlah 7.826 jiwa dan perempuan sejumlah 7.179 jiwa yang secara terinci dapat dilihat sebagaimana tabel 14 berikut:

Tabel 14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	0-4		5-19		20-49		50-59		> 60	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sumengko	243	239	919	819	1.377	1389	250	267	316	383
2.	Kapas	214	206	803	712	1.126	1199	218	230	341	326
3.	Blitaran	83	83	321	285	482	458	86	90	256	219
4.	Kedungsoko	76	69	287	242	429	409	78	77	103	109
5.	Nglundo	93	90	351	308	530	533	95	100	108	183
6.	Bungur	133	103	505	424	769	714	139	143	173	208
7.	Sukomoro	125	131	475	451	719	765	130	148	160	220
8.	Pehserut	120	128	415	388	658	632	120	115	224	165
9.	Ngrami	159	154	599	497	904	896	165	174	199	265
10.	Bagor Wetan	125	126	470	413	709	736	130	143	147	207
11.	Putren	200	197	676	688	1.141	1164	207	223	334	317
12.	Ngrenget	91	91	343	335	514	518	94	98	115	119
Jumlah		1.662	1.617	6.164	5.562	9.348	9.413	1.712	1.808	2.476	2.721

Sumber: Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Sukomoro diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak pernah sekolah pada tahun 2011 sebanyak 5.321 orang, tamat SD 18.201 orang, tamat SMP 6.324 orang, tamat SMA 5.601 orang, tamat Diploma 291 orang dan taman Perguruan Tinggi 51.483 orang, S2 18 orang, S3 11 orang. Dilihat dari mata pencaharian atau sumber penghasilannya diketahui bahwa dari TNI 219 orang. Pegawai Negeri 598 orang, swasta 2.905 orang, perusahaan UKM 1.002 orang, petani 9,733 orang, pengusaha besar 126 orang,

tukang servis 108 orang dan TKI 107 orang. Di bawah ini akan dijelaskan tentang jumlah pendidikan penduduk beserta mata pencahariannya sebagai berikut:

Tabel 15 Jumlah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

No.	Desa/Kelurahan	Tidak Pernah Sekolah	Pendidikan yang Ditamatkan						
			SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3
1.	Sumengko	717	3.036	768	552	28	32	-	-
2.	Kapas	769	2.178	781	799	42	86	1	-
3.	Blitaran	350	826	336	225	9	16	1	-
4.	Kedungsoko	255	818	297	233	11	11	-	-
5.	Nglundo	276	857	462	419	13	12	-	2
6.	Bungur	395	1.434	473	476	18	29	-	2
7.	Sukomoro	346	1.047	620	825	68	77	5	2
8.	Pehserut	425	1.315	539	489	18	45	-	-
9.	Ngrami	521	1.936	442	389	11	51	1	1
10.	Bagor Wetan	433	1.645	483	276	16	16	-	-
11.	Putren	579	2.327	761	665	37	35	9	3
12.	Ngrenket	255	782	367	453	20	73	1	1
Jumlah		5.321	18.201	6.329	5.801	291	483	18	11

Sumber : Profil Kecamatan Sukomoro Tahun 2011

#### d. Kondisi Sosial dan Budaya Kecamatan Sukomoro

Kondisi sosial dan budaya di wilayah Kecamatan Sukomoro dapat dilihat dari data sarana dan prasarana bidang pendidikan, agama dan kesehatan sebagai berikut :

##### 1. Pendidikan

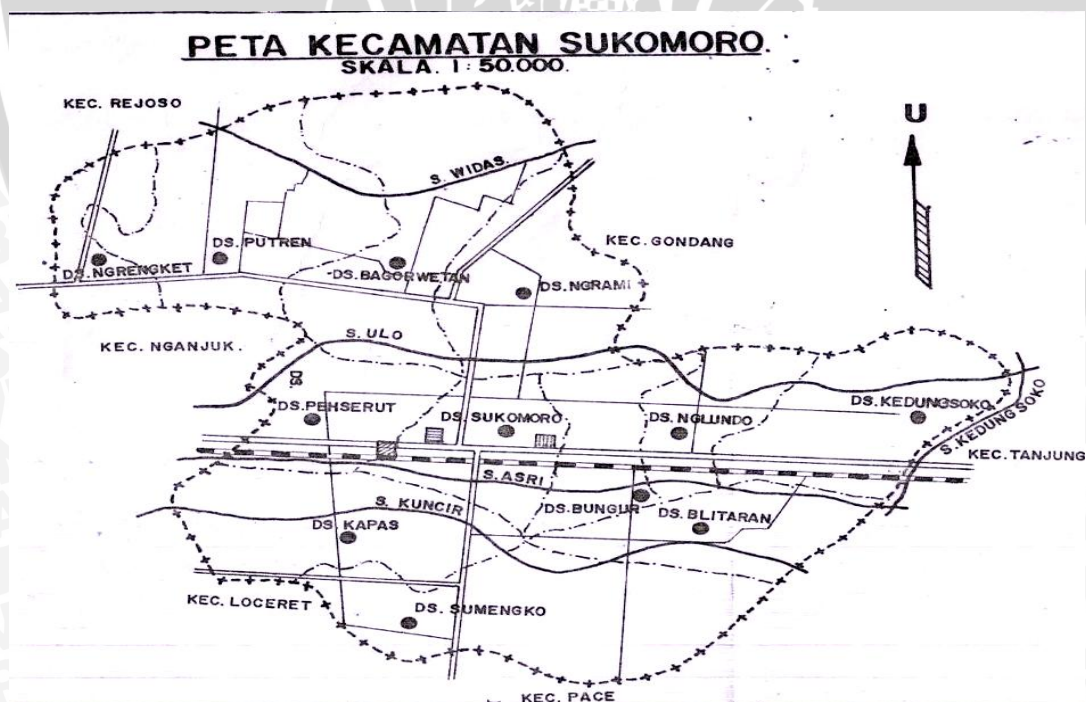
Sarana pendidikan yang dimiliki berupa Sekolah Taman Kanak – kanak (TK) berjumlah 23 buah, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 29 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 1 buah dan Swasta berjumlah 2 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri berjumlah 1 buah dan swasta 1 buah.

## 2. Agama

Berbagai pemeluk agama telah berkembang dalam tata kehidupan yang saling berdampingan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sukomoro memeluk agama Islam sebanyak 44.188 orang, Kristen 218 orang, Katholik 18 orang dan lainnya pemeluk agama Hindu dan Budha.

## 3. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan telah mendapat perhatian yang baik di Kecamatan Sukomoro, hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang mencapai 38 orang, terdiri dari 7 orang Dokter, 16 orang Bidan, 4 orang Perawat dan 11 orang dukun bayi. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan keluarga telah dikembangkan beberapa Posyandu di masing-masing Desa yang mencapai 54 Posyandu, 1 IPKM, 1 Pustu, 1 Klinik dan 9 Polindes.



Sumber : Kantor Kecamatan Sukomoro  
Gambar 3 Peta Wilayah Kecamatan Sukomoro

### 3. Profil Desa Putren

#### a. Kondisi Geografis

Desa Putren secara geografis merupakan salah satu wilayah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Balong Pacul Kecamatan Nganjuk, sebelah selatan Desa Werungotok Kecamatan Nganjuk, sedangkan di bagian timur dan barat berbatasan dengan Desa Ngrengket dan Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro. Dengan Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Desa Putren sebagai berikut:

Tabel 16 Luas Wilayah Menurut Penggunaan di Desa Putren

No	Uraian	Satuan
1.	Luas Permukiman	27,64 Ha/m <sup>2</sup>
2.	Luas Persawahan	290 Ha/m <sup>2</sup>
3.	Luas Perkebunan	13,63 Ha/m <sup>2</sup>
4.	Luas Kuburan	1,77 Ha/m <sup>2</sup>
5.	Luas Pekarangan/Tegalan	65,38 Ha/m <sup>2</sup>
6.	Luas Taman	-
7.	Perkantoran	1,8 Ha/m <sup>2</sup>
8.	Luas Prasarana Umum lainnya	2,49 Ha/m <sup>2</sup>
Total Luas		409,08 Ha/m <sup>2</sup>

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

Secara demografis jumlah penduduk Desa Putren Kecamatan Sukomoro adalah 5.298 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 2.631 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 2.667 jiwa serta dengan jumlah kepala keluarga sejumlah 1.387 KK yang secara terinci disajikan sebagaimana pada tabel 17 berikut :



Tabel 17 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	2.631 jiwa
2.	Jumlah Perempuan	2.667 jiwa
	Jumlah/Total	5.298 jiwa
3.	Jumlah Kepala Keluarga	1.387 KK

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

Potensi sumber daya manusia (SDM) di wilayah Desa Putren Kecamatan Sukomoro sesuai tingkatan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal yang ada sejumlah 4.265 orang, dengan tingkat pendidikan formal untuk penduduk laki-laki sejumlah 2.305 orang dan perempuan sejumlah 1.960 orang. Sedangkan tingkat pendidikan untuk informal sejumlah 149 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 70 orang dan perempuan sejumlah 79 orang. Distribusi tingkat pendidikan penduduk sesuai tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel 18 dan 19 sebagai berikut:

Tabel 18 Tingkat Pendidikan Formal di Desa Putren

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 7-18 Th yang sedang sekolah	355 orang	361 orang
2.	Tamat SD/ sederajat	647 orang	658 orang
3.	Tamat SMP/ sederajat	152 orang	156 orang
4.	Tamat SMA/ sederajat	398 orang	350 orang
5.	Tidak tamat SD/ sederajat	421 orang	209 orang
6.	Tidak tamat SMP/ sederajat	201 orang	102 orang
7.	Tidak tamat SMA/ sederajat	20 orang	19 orang
8.	Tamat D-1	2 orang	1 orang
9.	Tamat D-2	21 orang	19 orang
10.	Tamat D-3	4 orang	3 orang
11.	Tamat S-1	14 orang	13 orang
12.	Tamat S-2	5 orang	3 orang
13.	Tamat SLB B (tuna rungu)	1 orang	1 orang
	Jumlah/ Total	2.241 orang	1.895 orang

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

Tabel 19 Tingkat Pendidikan Informal di Desa Putren

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Kursus	6 orang	14 orang
2.	TK/Playgroup	64 orang	65 orang
Jumlah/ Total		70 orang	79 orang

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

Sedangkan mata pencaharian penduduk Desa Putren tergolong heterogen, dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, buruh ternak, pengrajin industri rumah tangga; disamping itu terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, dan karyawan swasta yang secara terinci dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini :

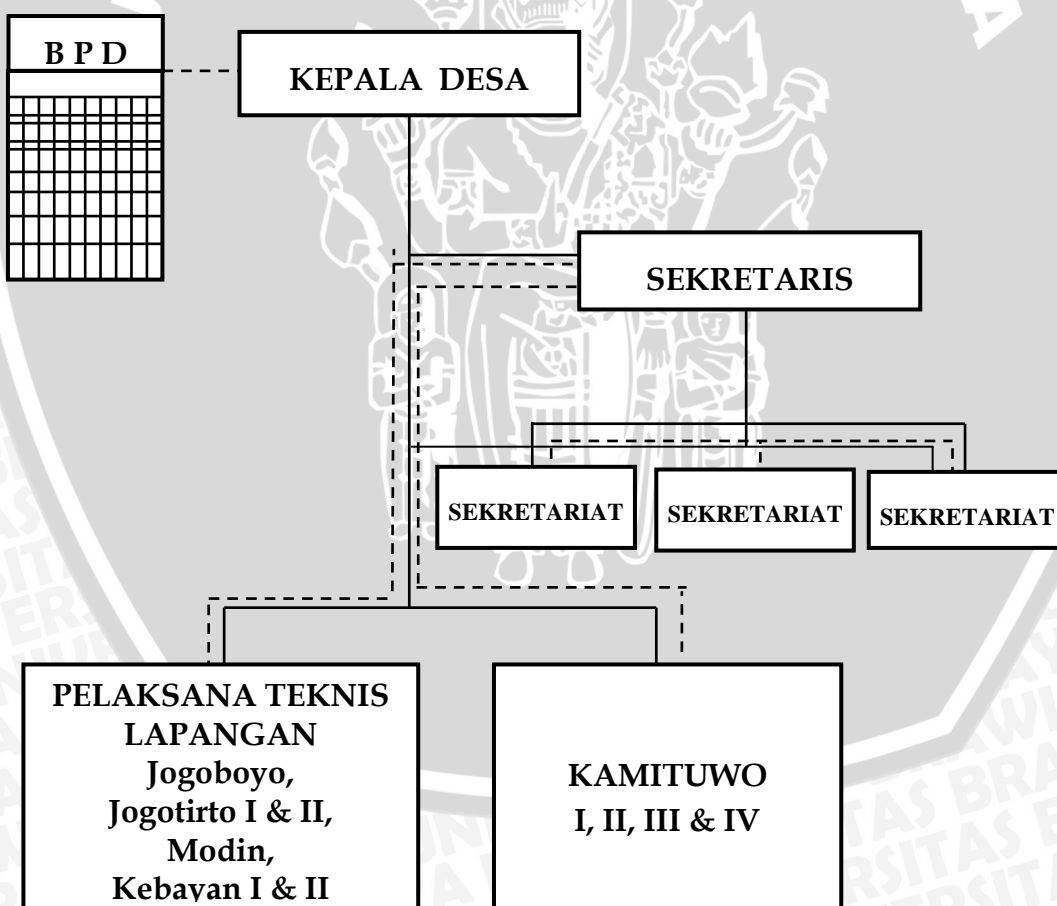
Tabel 20 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Putren

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	768 orang	400 orang
2.	Buruh Tani	632 orang	364 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34 orang	39 orang
4.	Pengrajin Industri rumah tangga	181 orang	10 orang
5.	Pedagang keliling	2 orang	12 orang
6.	Peternak	402 orang	-
7.	Montir	3 orang	-
8.	Bidan Swasta	-	1 orang
9.	Perawat Swasta	17 orang	31 orang
10.	TNI	21 orang	-
11.	POLRI	3 orang	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	9 orang	3 orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	24 orang	-
14.	Jasa pengobatan alternative	1 orang	1 orang
15.	Dosen Swasta	6 orang	-
16.	Karyawan pengusaha swasta	156 orang	300 orang
17.	Karyawan pengusaha pemerintah	6 orang	7 orang
18.	Sopir	6 orang	-
19.	Tukang Becak	6 orang	-
20.	Tukang Ojek	2 orang	-
21.	Tukang Cukur	2 orang	-
22.	Tukang Batu/Kayu	35 orang	-
Jumlah/ Total		2.316 orang	1.168 orang

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

**b. Pemerintahan Desa Putren**

Pemerintahan Desa Putren Kecamatan Sukomoro yang merupakan salah satu Pemerintah Desa dari 284 Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa nya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Putren Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut :



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMASPEMDES) Kab. Nganjuk

Gambar 4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Putren



Susunan organisasi Pemerintah Desa Putren sebagaimana tersebut di atas terdiri dari : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kamituwo 5 orang, Jogoboyo 1 orang, Jogotirto 2 orang, Modin 1 orang dan Kebayan 2 orang. Sedangkan data personil Pemerintah Desa Putren beserta tingkat pendidikannya dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 21 Aparatur Pemerintah Desa Putren menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No.	N a m a	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Sumarno, ST	Kepala Desa	Sarjana
2.	Lastri Rofi'ah	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Agus Y	Kamituwo	SLTA
4.	Kuswantoro	Kamituwo	SLTA
5.	Ibrahim	Kamituwo	SLTA
6.	M. Rofi'i	Kamituwo	SLTA
7.	M. Arif Hidayat	Kamituwo	SLTA
8.	Sunar WT	Jogoboyo	SLTA
9.	Januri	Jogotirto	SLTA
10.	Indiyah F	Jogotirto	SLTA
11.	Nidi	Modin	SLTA
12.	Suparji	Kebayan	SLTA
13.	Supriyadi	Kebayan	SLTA

Sumber : Profil Desa Putren Tahun 2011

Berdasarkan data pada tabel 21 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa Putren sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan SLTA sebanyak 12 orang dan hanya 1 orang Sarjana yaitu Kepala Desa Putren.

### c. Lembaga Kemasyarakatan

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Putren dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa Putren didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;

6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat;

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Pengembangan kemitraan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Putren dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 22 Lembaga Kemasyarakatan dan Jumlah Pengurusnya di Desa Putren

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
1.	Rukun Warga (RW)	6	18 orang
2.	Rukun Tetangga (RT)	32	95 orang
3.	Karang Taruna	1	15 orang
4.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1	24 orang
5.	Lembaga Pemberdayaan Masy. Desa (LPMD)	1	11 orang

Sumber : *Profil Desa Putren Tahun 2011*

#### d. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Putren

Kondisi sosial dan budaya di Desa Putren dapat dilihat dari data sarana dan prasarana bidang pendidikan, agama, kesehatan dan adat sebagai berikut :

##### 1. Pendidikan

Sarana pendidikan formal yang dimiliki Desa Putren berupa Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 3 buah dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 buah. Sedangkan sarana pendidikan non formal yang dimiliki yaitu Play Group/PAUD berjumlah 1 buah dan TPQ/TPA berjumlah 6 buah.

## 2. Agama

Sebagian besar masyarakat Desa Putren memeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.293 orang dan agama Kristen 6 orang. Kerukunan umat beragama maupun antar umat beragama berjalan dengan baik ditandai dengan tidak adanya kejadian terkait pelaksanaan ibadah masing-masing agama. Tempat ibadah berupa masjid sejumlah 6 buah dan mushola sejumlah 16 buah.

## 3. Kesehatan

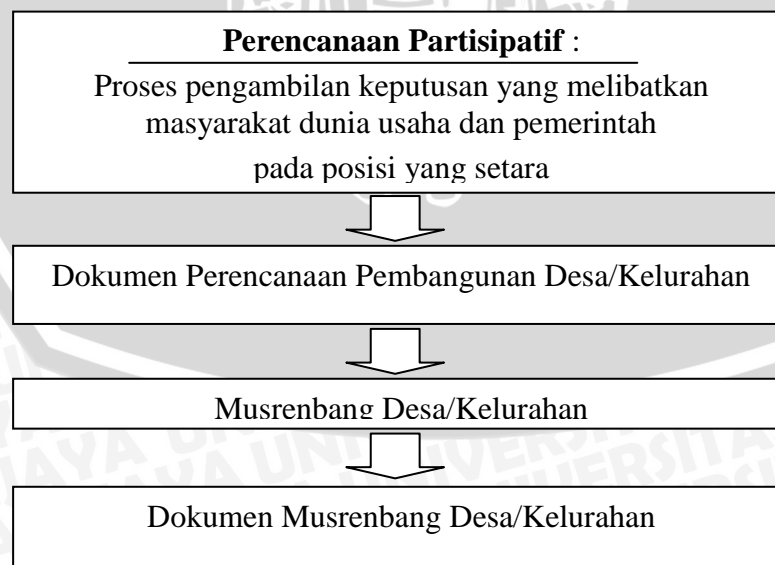
Sarana kesehatan yang ada di Desa Putren yaitu puskesmas pembantu sebanyak 1 buah, posyandu 5 buah, praktek dokter umum 2 buah, rumah bersalin 1 buah dan polindes 1 buah. Dukungan tenaga medis yaitu 3 orang dokter, bidan 5 orang, mantri kesehatan 2 orang dan tenaga laboratorium kesehatan 1 orang. Sedangkan dukungan tenaga kesehatan terlatih antara lain pengobatan alternatif 2 orang dan kader kesehatan 16 orang. Dengan kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan tenaga paramedis/non paramedis tersebut, maka diharapkan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik.

## B. Penyajian Data

### 1. Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif melalui Musrenbang di Desa Putren

Perencanaan pembangunan harus sinergi dengan perencanaan dari Pemerintah (*Top Down Planning*) dengan perencanaan dari Masyarakat (*Bottom up Planning*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meletakkan landasan hukum yang kuat dalam tahap pembangunan berikutnya.

Titik berat dari pembangunan adalah menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan sasaran mencapai kesejahteraan di lingkungan sekitar dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan arus utama pembangunan desa berdasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses-proses pembangunan akan mampu mengembangkan rasa memiliki, yang pada gilirannya menjadi pelaksana dan motor penggerak masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri. Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, diperlukan sebuah forum masyarakat untuk membahas dan berdiskusi tentang berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan desa yang dihadapi; guna mencari alternatif pemecahan masalah dengan merencanakan pembangunan secara baik melalui tahapan-tahapan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Forum masyarakat tersebut dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa.



Sumber : Bapemaspemdes Kab. Nganjuk

Gambar 5 Sinergi Perencanaan Tingkat Desa/Kelurahan



Untuk mengetahui gambaran secara umum perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (MUSRENBANGDES) di Desa Putren, disampaikan oleh Bapak Cuk Widiyanto dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk dan sebagai warga masyarakat Desa Putren, yang mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan pembangunan desa partisipatif di Desa Putren pelaksanaannya harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang merupakan kewajiban atau instruksi dari Pemerintah melalui BAPPEDA Kabupaten Nganjuk agar pembangunan di Desa Putren dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan melalui MUSRENBANG dengan mengajukan usulan/pendapat dari masyarakat untuk terwujudnya desa yang partisipatif. Selain itu juga sudah diatur dalam Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa serta petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang dari Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No 0008/M.PPN/01/2007 dan No 050/264A/SJ. Setiap tahun Pemerintah membuat petunjuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Khusus untuk Musrenbangdes dan Musrenbang kecamatan kami selalu berkoordinasi dengan Bapemaspemdes mengadakan monitoring untuk memantau pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.” (wawancara tanggal 27 Februari 2012, di Kantor Bappeda Kab. Nganjuk)

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Sumarno Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro juga menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pembangunan desa partisipatif dilaksanakan lewat kegiatan musyawarah pembangunan atau MUSRENBANG, saya dan seluruh masyarakat Desa Putren sangat setuju sekali dan mendukung diadakannya kegiatan MUSRENBANG ini sebagai forum agar masyarakat Desa Putren bisa menyalurkan uneg-unegnya maupun usulan atau pendapatnya demi terciptanya kesejahteraan Desa Putren karena pembangunan yang dilakukan di desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa yang selama ini rasa kepeduliannya sangat kurang/acuh tak acuh” (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Lastri Rofiah Sekretaris Desa Putren berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Putren dikatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Putren peduli sekali, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Putren semua masyarakat dilibatkan, antara lain dalam kegiatan kerja bhakti susuk wangan atau membersihkan saluran irigasi sawah ” ( wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Pada kesempatan lain gambaran umum terkait dengan keterlibatan masyarakat desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dapat terlihat jelas dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siswati Guru PAUD sebagai tokoh masyarakat desa bahwa :

“Ya, sudah melibatkan masyarakat pada saat musrenbang itu meskipun belum sempurna pelaksanaannya tetapi semua usulan pembangunan diambil dari usulan hasil musrenbang” ( wawancara tanggal 16 Februari 2012, di Gedung PAUD Desa Putren).

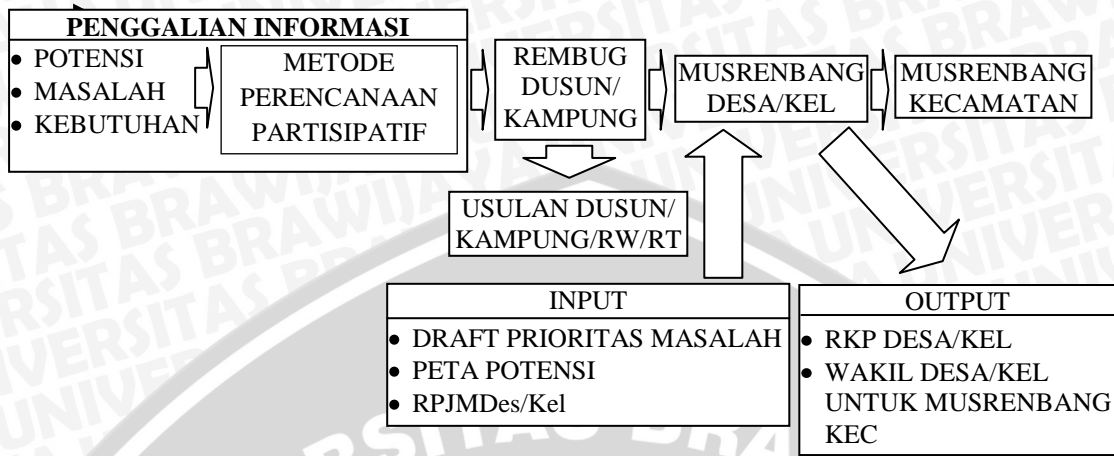
Pernyataan dari Ibu Siswati di atas didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mudilatul Lailil dan Ibu Widarwati tokoh wanita masyarakat Desa Putren sebagai berikut:

“bahwa masyarakat cukup peduli dan mendukung sekali pelaksanaan pembangunan karena merasa di uwongke (dihargai) meskipun belum maksimal, selanjutnya mengharapkan tetap dilibatkan dalam proses pembangunan mulai perencanaan sampai dengan pengawasan maupun pemeliharaan jadi tidak hanya dalam musrenbang di balai desa saja; sehingga tidak keluar dari tujuan semula dan betul-betul pembangunan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan masyarakat” (wawancara tanggal 17 Februari 2012, di Balai Desa Putren).

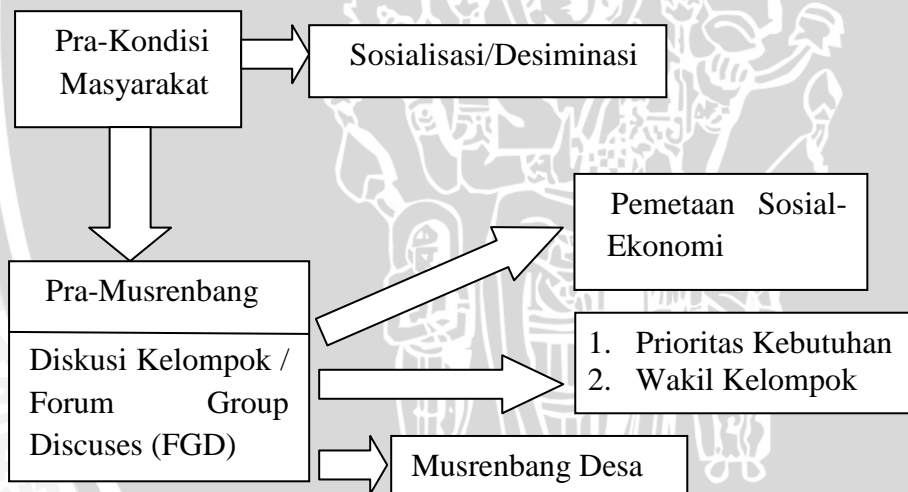
Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbangdes khususnya di Desa Putren telah dilakukan dan juga telah diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya oleh pemerintah secara berjenjang

serta melibatkan masyarakat, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala secara teknis yaitu tingkat kehadiran atau kepedulian masyarakat Desa Putren masih kurang maksimal/masih ada yang acuh tak acuh sehingga pelaksanaan perencanaan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Desa Putren masih belum bisa berjalan secara optimal. Namun demikian, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala dengan tingkat kehadiran peserta Musrenbang dan keterlibatannya yang acuh tak acuh, maka permasalahan tersebut bilamana dicermati kondisinya masih lebih baik apabila dibandingkan dengan masih adanya campur tangan pemerintah yang terlalu besar yaitu untuk pelaksanaan pembangunan bersifat *top-down* dan kurang fleksibel dalam memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara aktif pada setiap proses kegiatan pembangunan maupun pengambilan keputusan sehingga kedaulatan tidak berada ditangan masyarakat dan mekanisme pasar, kondisi tersebut akan menyulitkan terbangunnya suatu sistem pengelolaan pembangunan partisipatif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) agar mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi.

Adapun alur pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:



Sumber : BAPPEDA Kab. Nganjuk  
 Gambar 6 Alur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kelurahan



Sumber : BAPPEDA Kab. Nganjuk  
 Gambar 7 Alur Pra-Musrenbang Desa/Kelurahan

Pada hakekatnya pelaksanaan Pembangunan Desa Putren telah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang partisipatif dari para pemangku kepentingan desa (stake holders) dan telah menghasilkan usulan kegiatan yang merupakan serangkaian upaya pembangunan

yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan desa, keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana di pedesaan yang meliputi transportasi, prasarana air bersih dan kondisi irigasi, serta pemerintahan desa.

Penelitian yang dilakukan pada Desa Putren memperoleh data yang meliputi beberapa tahapan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa sebagai berikut :

**a. Tahap Persiapan Musrenbangdes**

Dalam tahap persiapan ini aktivitas yang dilakukan menurut Bapak Sumarno, Kades Putren Kec. Sukomoro adalah :

“Tahap persiapan ini kami melakukan penetapan fasilitator dengan tugas yang harus dilaksanakan. Juga menentukan wakil utusan dari dusun, RW, dan kelompok masyarakat, dimana mereka diharuskan sudah melakukan musyawarah dalam internalnya dengan hasil yang dibawa ke musrenbangdes. Dan kami juga mengeluarkan Keputusan Desa tentang Tim Penyelenggara Musrenbangdes” (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren)

Secara detailnya persiapan Musrenbangdes yang disampaikan oleh Pak Kades dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menetapkan Tim Fasilitator Musrenbangdes yang terdiri dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan aparat Pemerintah Desa lainnya. Tugas Tim Fasilitator tersebut adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes itu sendiri.

Tim Fasilitator Musrenbangdes di Desa Putren adalah : Kepala Desa, Sekdes, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.

- 2) Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok masyarakat (misal : kelompok tani, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah tersebut adalah :
  - (a) Daftar masalah dan kebutuhan;
  - (b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/kelompok untuk diajukan ke Musrenbangdes;
  - (c) Wakil/Delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbangdes jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/RW/ kelompok disesuaikan dengan kondisi.
- 3) Tim Penyelenggara Musrenbangdes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 4) Tim Penyelenggara Musrenbangdes telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - (a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbangdes;
  - (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangdes minimal 7 hari sebelum pelaksanaan;
  - (c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangdes;
  - (d) Menyiapkan tempat di Balai Desa, peralatan dan bahan untuk Musrenbangdes.

Keadaan diatas dibenarkan oleh Ibu Lastris Rofiah Sekretaris Desa Putren sesuai hasil wawancara yang berkaitan dengan Tahap Persiapan Musrenbangdesa, disampaikan bahwa :

“Tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Desa, dengan jumlah wakil/delegasi yang datang sebanyak 25 orang dari yang diundang sejumlah 50 orang. Sedangkan Tim Penyelenggara juga mempersiapkan agenda kegiatan, tempat, jumlah peserta dan materi.” ( wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa tahap persiapan musrenbang telah dilaksanakan sesuai pedoman yang ada, dengan menghasilkan wakil/delegasi dari dusun/RW untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes.

#### **b. Tahap Pelaksanaan Musrenbangdes**

Dalam tahap pelaksanaan Musrenbangdes, menurut aturan dan tata-tertib yang ada, yang disampaikan oleh Bapak Kades maupun Ibu Sekretaris desa, meliputi :

- 1) Pendaftaran peserta/undangan (mengisi daftar hadir)
- 2) Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
- 3) Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan APBDes tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai prioritas pembangunan desa, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya.
- 4) Pemaparan Kepala Desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

- 5) Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima tahun berikutnya.
- 6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat.
- 7) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (*masukan : kegiatan prioritas*) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa.
- 8) Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang akan diselesaikan desa di tingkat desa, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang akan dibahas dalam Musrenbang kecamatan.
- 9) Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan.
- 10) Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan menyertakan perwakilan perempuan.
- 11) Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes oleh Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD.

Hal yang paling penting dalam tahapan pelaksanaan Musrenbangdes adalah pemaparan program sebagaimana dikatakan oleh Ibu Lastri Rofiah Sekretaris Desa Putren bahwa :

“Kegiatan pemaparan dilakukan dari berbagai bidang, ada bidang wajib dan bidang pilihan, berdasarkan analisa keadaan darurat dan kegiatan supradesa.” (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).



Lebih lanjut Ibu Lastri Rofiah menyampaikan bahwa :

“terkait dengan penerapan pembangunan sesudah dilaksanakan musrenbangdes, Desa bisa melakukan kegiatan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan desa yang dihasilkan dalam musrenbangdes tersebut. Tentu ditunjang dengan pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan”. (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Bapak Supriadi sebagai salah satu Perangkat Desa Putren terkait tahap pelaksanaan musrenbangdes juga menyampaikan bahwa :

“Pemaparan dari berbagai bidang (bidang wajib/pilihan) berdasarkan analisa keadaan darurat supra desa” sedangkan penerapan sebelum/sesudah musrenbang dikatakan bahwa : “Desa bisa memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mendesak”. (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum adanya RPJMDesa rencana pembangunan tidak terarah, sesudah adanya RPJMDesa pembangunan menjadi terarah”. ( wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Terkait pernyataan dari Ibu Lastri Rofi'ah dan Bapak Supriadi dalam pelaksanaan Musrenbang desa tersebut, digaris bawahi oleh Ibu Mudilatul Lailil dan Ibu Widarwati maupun Ibu Siswati yang menyampaikan bahwa:

“Setiap kali ada rencana pembangunan selalu ada pertemuan atau rapat dibalai desa dan menanyakan kebutuhannya apa yang mendesak untuk dipenuhi melalui pembangunan, hal ini menyebabkan masyarakat merasa dibutuhkan, dihargai dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan” (wawancara tanggal 17 Februari 2012, di Balai Desa Putren).

Dari data di atas diketahui bahwa tahap persiapan dan pelaksanaan musrenbangdes telah berjalan sebagaimana diharapkan dan memberikan ruang gambaran partisipatif yang aktif dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Sehingga memberikan perwujudan proses pemberdayaan

masyarakat (*empowerment*) secara riil meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaannya.

### c. Keluaran Musrenbangdes

Hasil akhir dari Musrenbangdes adalah keluaran dokumen rencana pembangunan skala desa, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Cuk Widiyanto, yang mengatakan bahwa :

“Musrenbangdes sebagai mekanisme partisipatif masyarakat desa dalam merumuskan keinginan masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah yang dianggap mendesak sekaligus keinginan menjadi lebih baik dari segala aspek, maka hasil akhir dari Musrenbangdes adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPDesa), juga RPJMDesa, serta Rencana Anggaran Pembangunan desa tersebut” (wawancara tanggal 27 Februari 2012, di Kantor Bappeda Nganjuk)

Penjelasan lebih rinci dari keterangan Bapak Cuk Widiyanto di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang berisi :

- 1) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan atau pendapatan asli desa/swadaya.
- 2) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

Dari pengamatan data dokumen musrenbangdes di Desa Putren diketahui bahwa terdapat dokumen meliputi : Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, Dokumen Prioritas Pembangunan skala desa dan Usulan Prioritas Pembangunan Musrenbang kecamatan, daftar hadir musrenbangdes dan Berita Acara

Musrenbangdes. Dengan demikian keluaran dari kegiatan musrenbangdes di Desa Putren telah terpenuhi.

Dokumen pembangunan skala desa yang didanai dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi : Kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD; dan Kegiatan Belanja Pemberdayaan Masyarakat yaitu pengaspalan jalan di 1 (satu) Dusun.

Dokumen Usulan Prioritas Pembangunan untuk Musrenbang Kecamatan meliputi 10 kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari Anggaran Pemerintah Kabupaten/Provinsi (APBD) maupun Pusat (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Usulan kegiatan yang akan didanai dari Pemerintah Kabupaten yaitu pengaspalan jalan di dusun (4 kegiatan);
- 2) Usulan kegiatan akan didanai dari Pemerintah Provinsi yaitu Pembangunan Saluran Irigasi Desa (3 kegiatan);
- 3) Usulan kegiatan yang akan didanai dari Pemerintah Pusat yaitu 3 kegiatan terdiri dari : Rehabilitasi Polindes, Pembangunan Gedung PAUD dan Rehab Gedung SD.

Usulan tersebut berasal dari usulan kegiatan pembangunan yang telah dibuat oleh wakil dari dusun/RW dengan jumlah seluruhnya 15 kegiatan dan setelah diadakan musyawarah maka disepakati bersama menjadi 10 kegiatan pembangunan.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif melalui Musrenbang di Desa Putren

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Putren berdasarkan hasil penelitian didalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor :

### a. Faktor Internal, meliputi :

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes di Desa Putren adalah tingkat kehadiran wakil/delegasi dari Dusun/RW. , sebagaimana Bapak Sumarno Kepala Desa Putren mengatakan bahwa :

“faktor internal sebagai penghambat adalah “kurangnya peserta rapat”, padahal dari Pemerintah Desa dengan ditunjang oleh organisasi kemasyarakatan desa lainnya sebagai tim fasilitator telah menyebar undangan juga pengumuman, tetapi kehadiran masyarakat belum seperti yang diharapkan” (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Sejalan dengan itu, Ibu Lastri Rofiah Sekretaris Desa mengatakan bahwa :

“kurangnya kehadiran peserta dari warga masyarakat, termasuk tokoh masyarakat merupakan pemandangan yang perlu mendapat perhatian serius untuk waktu-waktu mendatang. Karena semua orang tentu tahu bahwa kehadiran dalam rapat juga merupakan indikator partisipasi. Dan dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa kami kehadiran peserta yang diharapkan perlu ditingkatkan sehingga persoalan yang ada di desa dapat diselesaikan”. (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Dengan demikian faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan musrenbang adalah tingkat kehadiran wakil/delegasi dari Dusun/RW yang masih kurang. Dari data dokumen daftar hadir musrenbangdes diketahui bahwa dari 50 wakil/delegasi Dusun/RW yang telah ditetapkan pada tahap persiapan

yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang sebanyak 25 orang. Oleh karenanya setiap permasalahan, kebutuhan dan gagasan atau usulan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dari dusun maupun desa belum secara komprehensif dan holistik tertangani secara baik.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes di Desa Putren adalah masukan dan informasi pembangunan dari para peserta, pemerintah kecamatan dan UPTD di kecamatan. Hal ini sebagaimana diutarakan Bapak Sumarno Kepala Desa Putren terkait dengan pihak-pihak luar desa yang hadir dalam musrenbang bahwa :

“Kecamatan dan UPTD hadir ikut memantau jalannya musrenbang di Desa Putren. Mereka juga memberikan masukan atau saran bahwa mengarahkan pendapat pada masyarakat karena masyarakat ada yang sebagian yang tidak memahami pentingnya musrenbang dengan berbagai usulannya”. (wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Lastri Rofiah Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa :

”perwakilan dari kecamatan selalu hadir dalam musrenbang setiap tahun dan aktif memberikan masukan-masukan dan informasi pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga berlangsungnya musrenbangdes tidak vakum, tetapi dinamis. Masyarakat yang ikut hadir, yang awalnya diam kemudian ikut memberikan masukan setelah adanya sedikit penjelasan dan motivasi dari pihak kecamatan”.(wawancara tanggal 14 Februari 2012, di Kantor Desa Putren)

Dari uraian diatas nampak sekali bahwa kehadiran pihak dari kantor kecamatan dan UPTD kecamatan Sukomoro sebagai nara sumber dapat memberikan kontribusi untuk dinamika pelaksanaan musrenbangdes, selain

memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan musrenbang juga memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di tingkat desa se wilayah kecamatan Sukomoro dan Kabupaten Nganjuk sebagai bahan musyawarah dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa Putren.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif melalui Musrenbang di Desa Putren**

Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif di Desa Putren dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

##### **a. Tahap Persiapan Musrenbangdes**

- 1) Ditetapkan Tim Fasilitator Musrenbangdes dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Disepakati jumlah wakil atau delegasi dari dusun/RW/kelompok sebanyak 50 orang, namun yang hadir sejumlah 25 orang perwakilan..

##### **b. Tahap Pelaksanaan Musrenbangdes**

- 1) Pemaparan program atau kegiatan oleh Kepala Desa berdasarkan RPJMDesa.
- 2) Penetapan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang.

Berdasarkan penyajian data tahap persiapan musrenbang diketahui bahwa pelaksanaan persiapan musrenbang telah dapat dilaksanakan secara baik meskipun tingkat kehadiran peserta belum memenuhi harapan, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2007 dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas No 0008/M.PPN/01/2007 dan No 050/264A/SJ, yaitu :

“Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dan dengan memperhatikan RPJMDesa/ Kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Sedang peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama”.

Hal ini ditandai dengan telah ditetapkannya wakil dusun/RW sebagai peserta dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Putren. Penetapan ini penting dilakukan untuk menjamin keterwakilan dusun/RW dalam pembahasan usulan kegiatan pembangunan di dusun/RW masing-masing. Selanjutnya berdasarkan penyajian data tahap pelaksanaan musrenbangdes diketahui bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Putren, didahului dengan pemaparan oleh Kepala Desa Putren tentang rencana kegiatan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan sesuai RPJMDesa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yaitu :

“Pasal 2 ayat (3) bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Pasal 5 ayat (1) bahwa Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; ayat (2) bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : Pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang, dan penggalian informasi”. Setelah pemamparan dilanjutkan dengan penyampaian usulan kegiatan

pembangunan dari masing-masing wakil dusun/RW dan diadakan musyawarah perencanaan untuk ditetapkan kegiatan pembangunan di Desa Putren yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan di tahun sebelumnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya. Karena hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa, sehingga didalam penyusunan RPJMDesa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ali Hanapiah (2011).

Dengan demikian tahapan perencanaan maupun pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan tersebut diatas selaras dengan konsep pembangunan atau paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*) sebagaimana disampaikan oleh Korten dalam Tjokrowinoto, 1999:218, bahwa :

“Dalam paradigma pembangunan yang bertumpu atau berpusat pada manusia yang harus mendapat perhatian untuk proses pembangunan adalah pelayanan sosial (*social service*), pembelajaran sosial (*social learning*), pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*), kelembagaan (*institutional building*). Mengingat paradigma yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*) ini adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*)



dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia”.

### c. Keluaran Musrenbangdes

- 1) Kegiatan pembangunan desa yang didanai dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan atau pendapatan asli desa/swadaya masyarakat.
- 2) Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan.
- 3) Berita Acara Musrenbang Desa.

Berdasarkan penyajian data sebelumnya diketahui bahwa keluaran dari kegiatan musrenbangdes di Desa Putren meliputi : dokumen kegiatan pembangunan yang didanai desa, dokumen kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan dan berita acara musrenbangdes telah terpenuhi. Kondisi tersebut tentunya sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan musrenbangdes sebagaimana yang diharapkan.

Dari kegiatan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Putren mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan telah sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2007 dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas No 0008/M.PPN/01/2007 dan No 050/264A/SJ dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan segenap unsur masyarakat di Desa Putren. Keterlibatan masyarakat tersebut menjadi

penting untuk keberhasilan pelaksanaan musrenbang karena menurut pendapat

Suryono (2001:122) disampaikan bahwa :

“Keterlibatan rakyat menjadi penting artinya dalam pembangunan, pertama berupaya memadukan atau mengkawinkan model *top-down* dengan *bottom-up* agar program pembangunan tersebut dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kedua memotivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki, bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan. Pendapat tersebut sesungguhnya ingin menegaskan betapa pentingnya keterlibatan rakyat yang selama ini seringkali hanya menjadi sekedar obyek kebijakan kepentingan pemerintah atau birokrat”.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif melalui Musrenbang di Desa Putren**

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Putren berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi :

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes di Desa Putren sesuai hasil penelitian adalah tingkat kehadiran wakil/delegasi dari Dusun/RW. Berdasarkan penyajian data terlihat bahwa dari 50 orang yang diundang sebagai wakil / delegasi masing-masing Dusun/RW yang ditetapkan sebagai peserta musrenbangdes namun yang hadir dalam pelaksanaan musrenbang diketahui sebanyak 25 orang atau 50% dari jumlah peserta yang ditetapkan. Dari data dokumen daftar hadir diketahui bahwa terdapat wakil dari 2 RW yaitu RW 02 dan RW 06 sama sekali tidak ada wakil yang hadir dalam musrenbang karena alasan pada saat musrenbangdes ada kepentingan di luar desa. Kondisi ini

tentunya kurang mendukung kelancaran perencanaan pembangunan yang mengakibatkan usulan dari 2 RW tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti apakah termasuk prioritas atau tidak. Pada akhirnya atas dasar musyawarah usulan dari 2 RW tersebut tidak masuk dalam usulan prioritas kegiatan pembangunan Desa Putren baik yang didanai dari desa maupun dari pemerintah kabupaten/provinsi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi partisipasi masyarakat yang tergolong masih lemah tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Muluk (2007:152) bahwa :

“Perwujudan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena masyarakat belum terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela” Kondisi ini disebabkan penerapan paradigma tersebut masih berada dalam masa transisi menuju demokrasi.

Hal tersebut cukup bertentangan dengan konsep pemikiran yang disampaikan oleh Korten dalam (Supriatna : 2000) bahwa karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (masyarakat) harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal.
- b. Fokus utamanya adalah memperkuat rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan menurut daerahnya.
- c. Toleransi terhadap perbedaan.
- d. Proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek.
- e. Budaya kelembagaan yang ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi.
- f. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan LSM lokal, satuan organisasi tradisional mandiri dan sebagainya.

Dilandasi ketentuan dan teori diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Oleh sebab itu, maka kesadaran, peran serta masyarakat dan swadaya gotong royong perlu ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes di Desa Putren adalah masukan dari peserta, pemerintah kecamatan dan UPTD di kecamatan. Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa banyak masukan yang diberikan oleh peserta, pemerintah kecamatan dan UPTD kecamatan. Masukan tersebut meliputi usulan program kegiatan pembangunan dari peserta dan nara sumber untuk memberikan wawasan kepada tim fasilitator serta peserta musrenbang tentang ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi melalui APBD untuk mendanai seluruh kegiatan pembangunan secara umum, dan kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dengan RPJMDesa dan RKPDesa.

Hal ini tentunya sangat bermanfaat dalam mendukung pembahasan perencanaan pembangunan di Desa Putren. Atas masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) tersebut, maka usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan wakil dusun (RT/RW) sejumlah 15 kegiatan pembangunan setelah mendapat masukan dari pemerintah kecamatan dan UPTD maka disepakati hanya 10 kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai

pemerintah kabupaten melalui APBD. Karena menurut Wahyudi (2006:7), bahwa :

“proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pada dasarnya merupakan proses yang cukup sederhana dan siapa saja yang terlibat sesungguhnya bisa menyusun perencanaan tersebut asal bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai *political will*... untuk melibatkan masyarakat secara partisipatif. Proses perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan: 1) proses politik; 2) proses teknokratik; 3) proses partisipatif; 4) proses *bottom-up* dan *top-down*”.

Sehingga keberadaan faktor eksternal tersebut mendukung proses perencanaan pembangunan desa melalui musrenbang agar lebih terarah sebagaimana RPJMDesa dan RKPDesa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Putren, kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Friedman (dalam Sinaga, 2005) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif atau perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau *participatory planning* sebenarnya adalah merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negoisasi antara seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penetapan program pembangunan. Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan *stakeholder* terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Suzetta (2007), bahwa sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif.